



STAKEHOLDER  
ADVISORY  
COMMITTEE

**Stakeholder Advisory Committee (SAC) dalam  
Kebijakan Pengelolaan Lestari APRIL (SFMP)  
– Stakeholder Forum dengan LSM Setempat, Pekanbaru, 26 May 2015 –**

|   |   |
|---|---|
| <b>ANGGOTA SAC</b>                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Joe Lawson (<i>Ketua</i>)</li><li>2. Al Azhar</li><li>3. Budi Wardhana</li><li>4. Jeffrey Sayer</li><li>5. Peter White</li></ol>   |
| <b>PERWAKILAN PEMANGKU<br/>KEPENTINGAN SETEMPAT</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aiden Yusti, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Riau</li><li>2. Tengku Rafizal, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR)</li><li>3. Teddy H, Kabut Riau</li><li>4. M. Yudi, WWF Riau</li><li>5. Rames IP, Scale Up</li><li>6. Anie, Scale Up</li><li>7. Syahrudin, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR)</li><li>8. Benk, Jikalahari</li><li>9. Made Ali, Jikalahari</li><li>10. Nurul Qomar, Universitas Riau</li><li>11. Mochamad Ikhwan, Fakultas Kehutanan, Universitas Lancang Kuning</li></ol>   |
| <b>TANGGAL</b>                                      | 26 Mei 2015   |
| <b>TEMPAT</b>                                       | Ruang Meeting II, Hotel Labersa, Pekanbaru  |
| <b>TOPIK DISKUSI:</b>                               |   |
| <b>A. Saran terhadap SFMP 2.0:</b>                  |   |
|   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meminta APRIL (<i>Perusahaan</i>) untuk mempertimbangkan 'Gerakan Nasional Selamatkan Hutan dan Sumber Daya Alam' yang merupakan inisiatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengembangkan SFMP 2.0;</li><li>2. Meminta Perusahaan untuk menghentikan penggunaan kayu dari hutan alam (<i>mixed hardwood/ MHW</i>);</li><li>3. Meminta Perusahaan untuk hanya melakukan restorasi lahan gambut yang terdegradasi atau yang sudah rusak;</li><li>4. Meminta Perusahaan untuk memperluas cakupan SFMP 2.0 sehingga menjangkau masalah-masalah sosial dan resolusi konflik.</li></ol> |



**B. Saran untuk implementasi dan verifikasi SFMP 2.0:**

1. Meminta Perusahaan untuk menyediakan rincian dari SFMP 2.0, termasuk rencana kerja, pengaturan waktu, hingga indikator kunci penilaian. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para pemangku kepentingan dalam mengawasi implementasi SFMP 2.0 dan memberikan masukan bagi SAC ataupun kepada Perusahaan;
2. Penting untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai SFMP 2.0 antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan utama;
3. Meminta SAC untuk melibatkan LSM setempat dalam upaya verifikasi SFMP 2.0 karena para LSM tersebut mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di lapangan. Salah satu ide adalah mengundang para LSM setempat untuk ikut melakukan penilaian atau audit bersama dengan KPMG;
4. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan utama adalah sangat penting. Saat ini Perusahaan hanya berkomunikasi melalui website, blog dan twitter milik Perusahaan, tetapi jarang mengadakan pertemuan langsung dengan LSM lokal. Meminta Perusahaan untuk memperbaiki strategi komunikasinya dan meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan dan kemajuan SFMP 2.0.

**C. Saran untuk kegiatan Stakeholder Forum dan SAC:**

1. Kebanyakan peserta menilai bahwa kegiatan Stakeholder Forum sangatlah penting bagi SAC dan juga bagi para pemangku kepentingan, dimana SAC dapat mendengar informasi faktual dari lapangan dan sebaliknya para pemangku kepentingan dapat memiliki sarana untuk menyampaikan masukannya kepada SAC. Semua setuju bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara berkala, baik itu sebelum atau sesudah pertemuan SAC;
2. Untuk meningkatkan efektifitas, LSM setempat menyarankan untuk mengundang perwakilan Perusahaan di Stakeholder Forum selanjutnya supaya mereka bisa menyediakan umpan balik secara langsung atas masalah yang didiskusikan;
3. Meminta SAC untuk membangun kepercayaan dengan menjadi lebih transparan, menjalin hubungan yang lebih erat melalui pertemuan secara berkala dengan LSM setempat.

**D. Masalah-masalah lain:**

1. Meminta Perusahaan untuk menyelesaikan konflik di Bagan Melibur karena terdapat izin dan peta yang tumpang tindih (SK 2013 melawan Peta Bupati 2006);
2. Meminta Perusahaan untuk memperbaiki perilaku dalam melakukan komunikasi secara *online* melalui akun twitter dan artikel di APRILDialog.

**KEGIATAN FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN SELANJUTNYA:**

Tempat: Provinsi Riau, Indonesia

Waktu: 9 November 2015